ABSTRAK

Ruslan: Perkembangan Pemikiran Lafran Pane 1946-1980

Pemikiran adalah' kegiatan manusia mencermati suatu pengetahuan yang telah ada dengan menggunakan akalnya untuk mendapatkan atau mengeluarkan pengetahuan yang baru atau yang lain. Pada awal abad ke-20 munculnya generasi awal intelektual muslim di Indonesia salah satunya di Sekolah Tinggi Islam (STI) merupakan pusat perkaderan bagi para pemimpin masa depan intelegensia muslim seperti Lafran Pane (lahir 1922), M Jusdi Ghazali (lahir 1923), Anwar Harjono (lahir 1923), dan Mukti Ali (lahir 1923) kelak berperan penting dalam pembentukan komunitas-komunitas epistemik dan jaringan intelektual Islam yang baru sebagai kendaraan baru bagi cita-cita Islam.

Nasionalisme Indonesia dalam melawan penjajahan. Masalah yang akan dijadikan acuan dalam pembahasan skripsi ini adalah: Pertama, Bagaimana Biografi Lafran Pane? Kedua, Bagaimana Pemikiran Lafran Pane dan Pengaruh pemikirannya (Terhadap Pemerintahan, Organisasi, dan Masyarakat) dari tahun 1946 sampai 1991.

Metode penelitian yang akan dilakukan dalam penelitian ini ialah metode penelitian sejarah di antaranya heuristik sebagai proses pengumpulan data, kritik sebagai proses seleksi sumber, interpretasi sebagai proses penafsiran sumber yang diproleh dan historiografi sebagai proses penulisan hasil penelitian.

Sebagai hasil penelitian Lafran Pane lahir pada 12 April 1923 di Kampung Pangurabaan, Kecamatan Sipirok, Lafran Pane adalah anak keenam keluarga Sutan Pangurabaan Pane dari istrinya yang pertama. Selanjutnya Wawasan dan intelektual Lafran Pane berkembang saat proses perkuliahan yang membawa pengaruh pada dirinya yang ditandai dengan semakin banyaknya buku-buku Islam yang ia baca. Karya tulis Lafran Pane dimulai pada tahun 1946 ketika memikirkan Negara Indonesia seperti sebuah organisasi yang tentunya harus mempunyai tujuan Berikut ini merupakan judul karya-karya Lafran Pane dengan bentuk artikel bebasnya yaitu Kesatu Keadaan dan Kemungkinan Kebudayaan Islam di Indonesia, kedua Wewenang Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Ketiga Kedudukan Dekret Presiden, Keempat Kedudukan Presiden, Kelima Kedudukan Luar Biasa Presiden, Keenam Kedudukan Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP), Ketujuh Tujuan Negara, Kedelapan Kembali ke Undang-undang Dasar 1945, Kesembilan Memurnikan Pelaksanaan Undang-undang Dasar 1945, Kesebelas Perubahan Konstitusional, dan Keduabelas Menggugat Eksistensi HMI.

BANDUNG